

Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Islam)

Nurfadilah ^{a,1}, Desy Arum Sunarta ^{b,2}, Rasyidah Bulqis ^{c,3}

^{1,2,3} STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: ^anurfadilahsahrudin@gmail.com, ^bdesyarumdas@gmail.com,
^crasyidahbulqis@gmail.com

DOI:

ABSTRACT

Keywords:
Family Hope
Program,
Welfare, Islamic
Economics

Poverty is a major challenge in development, including in Massewae Village, Duampanua District, Pinrang Regency. The Family Hope Program (PKH) is here as an effort to overcome this problem by providing financial assistance to underprivileged families. However, the distribution of assistance still experiences obstacles that require attention so that it is right on target. This study aims to analyze the effectiveness of PKH implementation in Massewae Village and its compliance with Islamic economic principles. Qualitative descriptive methods are used with observation, interview, and documentation techniques. The research subjects include recipients, assistants, PKH leaders, and related parties in program implementation. The results of this study indicate that: 1) The implementation of PKH has a positive impact on improving welfare, especially in health, education, and social aspects. However, there are still negative impacts in the form of dependence on aid. 2) Based on the perspective of Islamic economics, PKH in Massewae Village has reflected the principles of monotheism and balance, but still faces challenges in terms of the principles of caliphate and distribution justice.

Article Info:

Submitted:
03/10/2025
Revised:
22/10/2025
Published:
02/11/2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

INTRODUCTION

Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional. Salah satu permasalahan utama yang masih

dihadapi hingga kini adalah kemiskinan, yang menjadi hambatan serius dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan perhatian besar terhadap isu ini mengingat tingginya angka kemiskinan di Indonesia (Azzahra, Safitri, and Sujarwo 2024). Oleh sebab itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu dirancang dengan tepat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kemiskinan menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, yang hingga kini masih memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya melalui kebijakan perlindungan sosial, di antaranya melalui penyaluran bantuan sosial yang menyasar individu, keluarga, dan komunitas berpenghasilan rendah (Nasution, Masitho, and Hidayat 2024). Berbagai program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Salah satu program unggulan pemerintah dalam konteks ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer* atau CCT) yang ditujukan bagi keluarga prasejahtera untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2007 dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (Wulandari 2023). Melalui program ini, pemerintah berupaya menciptakan kemandirian bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. PKH telah diimplementasikan di berbagai wilayah, salah satunya di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Meskipun pelaksanaan PKH telah berjalan cukup lama dan menunjukkan hasil positif di berbagai daerah, implementasinya di Desa Massewae masih menghadapi sejumlah permasalahan. Beberapa keluarga kurang mampu belum terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara sebagian penerima bantuan justru tidak lagi memenuhi kriteria ekonomi yang seharusnya (Kamariani et al. 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, serta mengkaji pelaksanaannya dari perspektif ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam menilai sejauh mana prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial telah diterapkan dalam pelaksanaan PKH di tingkat desa.

LITERATURE REVIEW

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dalam bentuk bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan tidak hanya untuk menurunkan angka kemiskinan jangka pendek, tetapi juga untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (KPM) (Nazaruddin 2021). PKH dikenal secara internasional sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)*, yang mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Melalui bantuan keuangan yang diberikan kepada

keluarga kurang mampu, program ini mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial antar lapisan masyarakat (Mawaddah, Addiarrahman, and Ramli 2023).

Tujuan utama PKH adalah meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu dan rentan melalui penyaluran bantuan yang terarah dan berkesinambungan. Bantuan ini diarahkan agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Aeda and Jannah 2022). Dalam aspek kesehatan, PKH memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak dengan memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan gizi yang memadai. Adapun pada aspek pendidikan, PKH memberikan bantuan bagi anak usia sekolah untuk mencegah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan, sehingga menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Sementara pada aspek kesejahteraan sosial, PKH juga menysasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kemandirian melalui pemberdayaan ekonomi (TNP2K 2021). Program Keluarga Harapan (PKH) berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup KPM melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditetapkan berdasarkan tiga kriteria komponen utama, yaitu (Mufidah, Fikr, and Abadi 2022):

1. Komponen Kesehatan

Penerima manfaat dalam komponen ini mencakup ibu hamil, menyusui, serta baru melahirkan termasuk dalam program bantuan sosial untuk kesehatan. Selanjutnya, anak-anak berusia 0-6 tahun yang belum memasuki usia sekolah juga termasuk dalam kelompok ini.

2. Komponen Pendidikan

Bantuan PKH dalam kategori pendidikan ditujukan untuk anak-anak berusia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan wajib serta masih berstatus siswa di SD/MI, SMP/MTs, atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan

Kelompok penerima bantuan dalam kategori ini mencakup warga lansia (60 tahun ke atas) dan penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan aktivitas harian secara mandiri, serta terdaftar dalam Kartu Keluarga yang sama.

KPM berhak memperoleh bantuan tunai, pendampingan sosial, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Hikmat 2019). Namun, mereka juga wajib memenuhi komitmen sesuai ketentuan PKH, antara lain: menghadiri pemeriksaan kesehatan rutin, memastikan anak mengikuti kegiatan belajar minimal 85% kehadiran, dan berpartisipasi dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) (Ditama Binbangkum 2023). Bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan empat kali setahun melalui bank penyalur ke rekening KPM. Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori dan jumlah anggota keluarga, misalnya: ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp3.000.000/tahun; anak SD Rp.900.000/tahun; anak SMP Rp.1.500.000/tahun; anak SMA Rp.2.000.000/tahun; lansia dan penyandang disabilitas Rp.2.400.000/tahun (Ibrahim et al. 2021). Penyaluran dana dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai rekening

elektronik bagi penerima manfaat (Iswanto 2022). Sistem ini memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan transparan.

Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

Kesejahteraan tidak semata-mata dimaknai sebagai kekayaan materi semata, tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual, nilai-nilai moral yang baik dan hubungan harmonis dalam masyarakat. Ini berarti bahwa untuk mencapai kesejahteraan yang sejati, seseorang harus memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga bagaimana kehidupan mereka berkontribusi terhadap kebaikan sosial dan spiritual (Hasimi 2020). Sementara itu, keluarga penerima manfaat atau disingkat KPM didefinisikan sebagai unit keluarga yang menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dikukuhkan secara formal melalui ketetapan Direktur Jenderal (Nazaruddin 2021). Kesejahteraan keluarga penerima manfaat merupakan suatu kondisi di mana keluarga penerima bantuan sosial PKH tidak hanya mengalami perbaikan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan spiritual. Kesejahteraan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kecukupan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup melalui nilai-nilai moral dan hubungan sosial yang harmonis.

Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam merupakan suatu cara pandang menyeluruh dan mendalam tentang ekonomi Islam yang bertujuan menjelaskan konsep-konsepnya secara akurat dan rinci. Tujuannya adalah untuk menjadi landasan dalam berbagai kegiatan seperti pengadaan, penggunaan, atau pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini bertujuan untuk kebaikan individu, masyarakat, dan negara secara spiritual dan fisik, serta untuk memperoleh rida Allah Swt (Ibrahim et al. 2021). Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup beberapa hal penting, di antaranya prinsip tauhid, yang menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan iman kepada Allah Swt.; prinsip keseimbangan, yang mengajarkan harmoni antara kebutuhan material dan spiritual serta kepentingan individu dan masyarakat; prinsip khalifah, yang menegaskan bahwa manusia sebagai wakil Allah di bumi bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan adil dan bijaksana; serta prinsip keadilan, yang menuntut distribusi kekayaan dan sumber daya secara adil tanpa diskriminasi.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna dari fenomena sosial berdasarkan pandangan partisipan (Werdiningsih and B 2022). Penelitian kualitatif tidak melibatkan pengukuran statistik, melainkan menggambarkan realitas sosial melalui interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan (Sahir 2021). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara menyeluruh dan menggali persepsi masyarakat mengenai dampak program terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM).

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, seperti kata-kata atau catatan hasil wawancara dan observasi di lapangan (Haryono 2023). Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan peserta PKH, pendamping, dan Ketua PKH di Desa Massewae.

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah (Nasution 2023). Data ini mencakup literatur terkait pelaksanaan PKH dan ekonomi Islam.

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Nasaruddin dkk 2024). Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan PKH dan perilaku masyarakat penerima manfaat, sehingga peneliti dapat memahami realitas sosial yang terjadi di lapangan. Wawancara mendalam diterapkan untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan yang terlibat dalam program, seperti peserta PKH dan pendamping desa. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui telaah terhadap laporan resmi, arsip kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai *human instrument* dalam mengamati, menafsirkan, dan mengorganisasi data. Peneliti juga menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi sebagai alat bantu dalam pengumpulan data di lapangan. Pedoman observasi digunakan untuk mencatat perilaku dan situasi yang diamati, pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan terbuka untuk memandu proses wawancara, sedangkan pedoman dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang relevan dengan objek penelitian (Alhamid and Anufia 2019).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian. Proses analisis mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah agar lebih terarah pada tujuan penelitian (Citriadin 2020). Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi informasi hasil reduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antarkategori data (Bado 2022). Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan makna data dan menguji keabsahannya melalui proses verifikasi, termasuk triangulasi sumber dan diskusi dengan pihak terkait, guna memastikan keakuratan serta validitas hasil penelitian (Fatimah 2020).

RESULT AND DISCUSSION

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Massewae

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini secara nasional telah berjalan sejak tahun 2007, namun pelaksanaannya di Kabupaten Pinrang baru dimulai pada tahun 2014 (Agustina 2025). Implementasi PKH di wilayah ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan terus mengalami perkembangan dari segi jumlah penerima dan komponen bantuan yang diterapkan.

Berdasarkan data lapangan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Massewae menunjukkan fluktuasi dari tahun 2023 hingga 2025. Pada awal tahun 2023, jumlah KPM tercatat sebanyak 145 keluarga, kemudian menurun drastis pada pertengahan tahun menjadi 83 keluarga. Namun, sejak tahun 2024 jumlah penerima kembali meningkat hingga mencapai 181 keluarga pada awal tahun 2025 (Agustina 2025). Penurunan jumlah penerima di pertengahan tahun 2023 mencerminkan adanya

proses *graduasi* alami, yakni keluarnya peserta yang telah mencapai kemandirian ekonomi atau tidak lagi memenuhi syarat bantuan. Sebaliknya, peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya keluarga miskin baru yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Penyaluran bantuan PKH di Desa Massewae dilakukan secara triwulanan, yaitu empat kali dalam setahun: Januari–Maret, April–Juni, Juli–September, dan Oktober–Desember. Besaran bantuan berbeda-beda tergantung pada kategori komponen yang dimiliki oleh keluarga penerima. Komponen tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan pendidikan diberikan kepada anak yang bersekolah di tingkat SD, SMP, atau SMA, sedangkan bantuan kesehatan diberikan kepada ibu hamil dan anak usia dini untuk mendukung gizi serta layanan kesehatan. Sementara itu, komponen kesejahteraan sosial ditujukan bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Pelaksanaan PKH di Desa Massewae tidak hanya sebatas penyaluran dana, tetapi juga mencakup pendampingan intensif bagi penerima manfaat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi data, memastikan ketepatan jumlah, waktu, dan pemanfaatan bantuan, serta memberikan edukasi melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Melalui P2K2, penerima manfaat diberikan materi tentang pengelolaan keuangan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak. Pendekatan ini menjadikan PKH bukan sekadar program bantuan tunai, melainkan sarana pemberdayaan masyarakat miskin untuk menjadi lebih mandiri dan produktif.

Dalam proses seleksi penerima, kewenangan utama berada pada pemerintah pusat. Namun, masyarakat yang merasa layak tetapi belum terdaftar dapat mengajukan permohonan melalui kantor desa, yang memiliki operator khusus untuk memverifikasi dan menginput data calon penerima ke dalam sistem pusat.⁷ Mekanisme ini menjamin adanya transparansi sekaligus membuka akses bagi masyarakat agar tidak terlewat dalam pendataan.

Secara umum, pelaksanaan PKH di Desa Massewae memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam aspek pendataan, kesadaran masyarakat, serta ketergantungan terhadap bantuan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penerima melalui kegiatan edukatif dan verifikasi data yang lebih akurat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Implementasinya dapat dianalisis melalui empat prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, khalifah, dan keadilan.

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi kesadaran bahwa segala rezeki berasal dari Allah Swt., dan penggunaan harta merupakan bentuk amanah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Penerima manfaat PKH di Desa Massewae memaknai bantuan yang diterima sebagai rezeki dari Allah yang wajib

dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan keluarga. Hal ini mencerminkan sikap syukur dan tanggung jawab moral dalam penggunaan bantuan sosial sesuai dengan nilai tauhid.

Selanjutnya, prinsip keseimbangan terlihat dalam hubungan antara hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka memiliki hak untuk menerima bantuan dan layanan sosial, tetapi juga berkewajiban memenuhi komitmen dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta menghadiri kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Nazaruddin 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, keseimbangan antara hak dan kewajiban telah terlaksana dengan baik berkat peran aktif pendamping dalam memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada peserta program.

Prinsip khalifah tercermin dalam peran pendamping dan penerima manfaat yang bertanggung jawab dalam mengelola bantuan agar memberi manfaat jangka panjang. Pendamping PKH tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membimbing keluarga penerima melalui kegiatan edukatif seperti P2K2 untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatur keuangan dan mendidik anak. Namun demikian, prinsip khalifah belum sepenuhnya optimal karena sebagian masyarakat miskin yang layak menerima bantuan belum terdata sebagai penerima. Pendamping hanya mengarahkan warga untuk melapor ke kantor desa tanpa melakukan pendataan aktif, sehingga aspek tanggung jawab sosial belum sepenuhnya tercapai.

Terakhir, prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi dasar utama dalam penyaluran PKH. Prinsip ini menuntut agar distribusi bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penerima PKH di Desa Massewae sudah tepat sasaran, namun masih terdapat kasus di mana keluarga mampu tetap menerima bantuan, sementara keluarga miskin yang layak justru belum terdaftar. Mekanisme penetapan penerima yang dilakukan secara terpusat membatasi peran pendamping dalam memastikan keadilan distribusi di tingkat lokal. Meskipun terdapat mekanisme pelaporan dan verifikasi melalui kantor desa, sistem ini belum sepenuhnya efektif menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Desa Massewae telah berupaya mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam melalui prinsip tauhid, keseimbangan, khalifah, dan keadilan. Namun, optimalisasi prinsip khalifah dan keadilan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pendataan dan distribusi yang proaktif agar bantuan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang paling membutuhkan sesuai dengan tujuan syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*al-maslahah*) dan keadilan sosial.

CONCLUSION

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial. Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi kendala pada pemanfaatan bantuan yang belum optimal dan kecenderungan ketergantungan penerima terhadap bantuan tersebut. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan PKH telah mencerminkan prinsip tauhid dan keseimbangan, yang tercermin dari kesadaran penerima manfaat dalam memaknai bantuan sebagai amanah Allah Swt. serta keterpenuhan hak dan kewajiban dalam program. Namun, penerapan prinsip khalifah dan keadilan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pendataan calon penerima baru dan ketidaktepatan sasaran distribusi bantuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan tanggung jawab sosial melalui pendampingan aktif dan pendataan berbasis lapangan agar implementasi PKH dapat berjalan lebih adil, produktif,

serta sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

ACKNOWLEDGMENT (*If Any*)

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan pelaksanaan PKH, menjadi dorongan bagi penerima manfaat untuk lebih produktif dan mandiri, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian serupa di bidang ekonomi Islam.

REFERENCES

- Aeda, Nur, and Riadul Jannah. 2022. "Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8(1):169.
- Agustina. 2025. "Wawancara Pendamping PKH Desa Massewae."
- Alhamid, Thalha, and Budur Anufia. 2019. *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Azzahra, Annisa Syifa, Desy Safitri, and Sujarwo. 2024. "Peran Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah : Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1(2):h.3046.
- Bado, Basri. 2022. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Klaten: Tahta Media Group.
- Citriadin, Yudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)*. Mataram: Sanabil.
- Ditama Binbangkum. 2023. "BANSOS PKH 2023 TAHAP 3 Program Keluarga Harapan (PKH)." *BPK RI*. Retrieved ([https://jdih.bpk.go.id/File/Download/a8a1765a-7bd4-4b8f-8931-ac4b974799f4/Bansos PKH 2023.pdf](https://jdih.bpk.go.id/File/Download/a8a1765a-7bd4-4b8f-8931-ac4b974799f4/Bansos%20PKH%2023.pdf)).
- Fatimah, Siti. 2020. "Peran Guru Menanamkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negeri Mojorejo 2 Sukoharjo." *Jurnal Dikdas Bantara* 3(2):21–29. doi: 10.32585/dikdasbantara.v3i2.864.
- Haryono, Eko. 2023. "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *The Journal of Islamic Studies* 13(2):h. 4.
- Hasimi, Diah Mukminatul. 2020. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 2(1):85. doi: 10.24042/revenue.v1i01.5762.
- Hikmat, Harry. 2019. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, and Nofrianto. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Iswanto, Bambang. 2022. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Kamariani, Baiq Dewi, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, and Abdul Chalel Rahman. 2024. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Administrative and Social Science (JASS)* 5(1):205–19. doi: 10.58406/jeb.v8i3.570.
- Mawaddah, Fadila, Addiarrahman, and Fauzan Ramli. 2023. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam

- Perspektif Ekonomi.” *MASMAN : Master Manajemen* 1(4):117–34.
- Mufidah, Septiana, M. Khoirul Fikr, and M. Taufiq Abadi. 2022. “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa.” *Journal Of Social Science* 1(2):143.
- Nasaruddin, dkk. 2024. *Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif*. Padang: Gita Lentera.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nasution, Chairika, Beby Masitho, and Bimby Hidayat. 2024. “Pelaksanaan Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Medan.” *Journal of Public Policy* 10(1):h.25-26. doi: 10.52137/apjpp.v10i1.219.
- Nazaruddin, Pepen. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- TNP2K. 2021. *Laporan Perkembangan Program Keluarga Harapan: Dampak Pada Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan*. Jakarta: TNP2K.
- Werdiningsih, Endang, and Abdul Hamid B. 2022. “Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif.” *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 24(1):39.
- Wulandari, Desti. 2023. “Analisis Pola Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Ponre Waru Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.